



**LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kota yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020 mengacu pada Visi dan Misi Kota Tanjungbalai, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2016 - 2021. Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tanjungbalai, Maret 2021

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYABRIAL, SH, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Daerah	4
1.3 Gambaran Umum Penduduk	11
1.4 Struktur Organisasi	12
1.5 Kondisi dan proyeksi ekonomi Kota Tanjungbalai	14
1.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
1.7 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	17
1.8 Arah kebijakan Belanja Daerah.....	21
1.9 Ruang Lingkup.....	24

BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
---	----

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	25
2.2 Visi dan Misi Kota Tanjungbalai	27
2.3 Tujuan dan Sasaran	30
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
--	----

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	41
3.2 Analisis Capaian Kinerja	45
3.3 Akuntabilitas Keuangan	68

BAB IV PENUTUP	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan *Good Governance*. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sektor dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman serta sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Nasional.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Disamping itu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai dan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjungbalai kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020.

Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 ;
11. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019.

1.2. Gambaran Umum Daerah

a. Letak Geografis

Kota Tanjungbalai berada di kawasan pesisir Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada 2°58'15" – 3°01'32" Lintang Utara dan 99°48'00" – 99°50'16" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Letak wilayah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Asahan yang rinciannya seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kab/Kota beserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Sebagai implikasi dari otonomi tersebut, berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Februari tentang pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar, maka wilayah Kota Tanjungbalai menjadi 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Adapun Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai beserta luasnya dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datuk Bandar	5	2.249	37,16
2.	Datuk Bandar Timur	5	1.457	24,08
3.	Tanjungbalai Selatan	6	198	3,27
4.	Tanjungbalai Utara	5	84	1,39
5.	Sei Tualang Raso	5	809	13,36
6.	Teluk Nibung	5	1.255	20,74
Jumlah		31	6.052	100,00

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

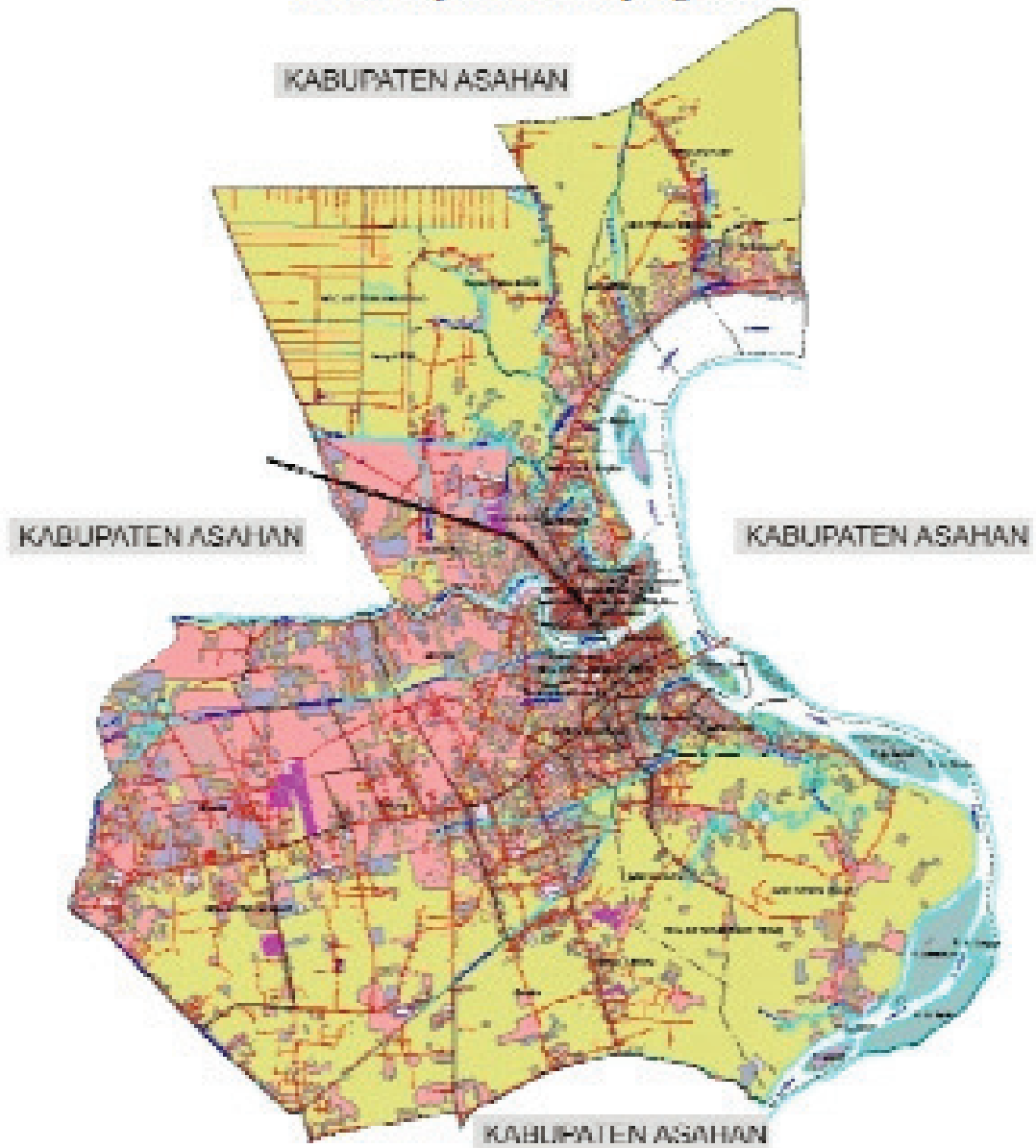
Terlihat bahwa Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan terluas yakni 37,16% dari total luas wilayah Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara 1,39%. Sementara daftar nama Kelurahan per Kecamatan terdapat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Nama Kelurahan dan Kecamatan se Kota Tanjungbalai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Datuk Bandar	1. Sijambi 2. Pahang 3. Sirantau 4. Gading 5. Pantai Johor
2.	Datuk Bandar Timur	1. Pulau Simardan 2. Semula Jadi 3. Selat Tanjung Medan 4. Selat Lancang 5. Bunga Tanjung
3.	Tanjungbalai Selatan	1. Tanjungbalai Kota I 2. Tanjungbalai Kota II 3. Indra Sakti 4. Pantai Burung 5. Karya 6. Perwira
4.	Tanjungbalai Utara	1. Tanjungbalai Kota III 2. Tanjungbalai Kota IV 3. Sejahtera 4. Mata Halasan 5. Kualo Silo Bestari
5.	Sei Tualang Raso	1. Sei Raja 2. Pasar Baru 3. Muara Sentosa 4. Sumber Sari 5. Keramat Kubah
6.	Teluk Nibung	1. Pematang Pasir 2. Perjuangan 3. Sei Merbau 4. Beting Kuala Kapias 5. Kapias Pulau Buaya

Sumber: BPS Kota Tanjungbai

Peta Wilayah Kota Tanjungbalai



b. Topografi

Kota Tanjungbalai terletak pada kemiringan 0-3% yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang oleh air dan berawa-rawa. Secara keseluruhan wilayah Kota Tanjungbalai merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar dengan ketinggian 0-3 m dari atas permukaan laut dan senantiasa dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

c. Hidrologi

Kondisi wilayah Kota Tanjungbalai sangat strategis karena terletak di pinggiran Sungai Asahan dan bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai berada pada pertemuan dua sungai yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau, namun masih ada beberapa sungai besar dan kecil yang membelah kota. Sungai-sungai kecil lainnya antara lain adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

d. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil survey lapangan, jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari penggunaan lahan terbangun sebesar 61,25 % dan lahan non terbangun 42,69 %. Jenis lahan terbangun yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan rakyat, kebun campuran dan lain-lain.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penggunaan lahan tertinggi di Kota Tanjungbalai adalah untuk lahan perkebunan (pertanian) yaitu seluas 203 Ha.

Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata.

Direncanakan sampai dengan tahun 2030 jenis budidaya yang terdapat di Kota Tanjungbalai meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkotaan dengan luas wilayah 5.072,49 Ha atau 83,83%. Kawasan perdagangan dan jasa menjadi kawasan yang mendominasi kegiatan di pusat kota dengan luasan yang direncanakan sebesar 339,72 Ha yang terdiri dari pasar tradisional yang terdapat di setiap Pusat Pelayanan

Kota (PPK), pusat perbelanjaan di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan pusat pertokoan modern di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Sampai tahun 2030 arahan pengembangan kawasan perkantoran diarahkan ke Kelurahan Pahang (Kecamatan Datuk Bandar/SPPK 1) untuk kawasan perkantoran pemerintahan. Sementara kawasan Perkantoran Swasta diarahkan bersatu di pusat-pusat perdagangan dan jasa atau kegiatan perekonomian lainnya, seperti : PPK (Pusat Pelayanan Kota), pusat-pusat perdagangan di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor, Sirantau (SPPK 1). Pengembangan kawasan industri di Kota Tanjungbalai pada prinsipnya sudah berkembang di hampir diseluruh sub pusat pelayanan kota, antara lain industri besar/ sedang tersebar di SPPK 1 (Kelurahan Pahang, Sirantau dan Pantai Johor), SPPK 3 (Kelurahan Keramat Kubah dan Sumber Sari) dan SPPK 4 (Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau dan Pematang Pasir). Sampai tahun 2030 pengembangan industri (*aglomerasi*) dan pergudangan diarahkan :

- Kawasan Industri (*aglomerasi* industri) diarahkan di Kelurahan Sei Raja (Kecamatan Sei Tualang Raso/SPPK 3) dengan luas 232,718 Ha
- Kawasan Pergudangan diarahkan di Kelurahan Beting Kuala Kapias dan Sungai Merbau (Kecamatan Teluk Nibung/SPPK 4) dengan luas 66,66 Ha.

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Tanjungbalai diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam. Sampai tahun 2030 jenis kegiatan pariwisata dan arahan lokasi wisata tersebut adalah :

- Wisata budaya diarahkan di kawasan bangunan bersejarah yakni di daerah pusat Kota yang direncanakan pada PPK dengan luas 5,04 Ha.
- Wisata buatan diarahkan pada pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu dan dermaga penyebrangan/*Water Front City* di Kelurahan Indra Sakti (Kecamatan Tanjungbalai Selatan) dan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur/SPPK 2).

e. Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kota Tanjungbalai yang relatif datar dan berada hanya 0-meter di atas permukaan laut menyebabkan Kota Tanjungbalai rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kota Tanjungbalai yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Silau dan Sungai Asahan.

Adapun daerah-daerah yang terkena dampak paling terdahulu umumnya adalah daerah yang berada di sekitar aliran sungai yaitu di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Gading (Kecamatan Datuk Bandar), Kelurahan Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur).

f. Demografi

Penduduk sebagai faktor yang mendominasi pelaksanaan pembangunan yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dari pembangunan perlu diketahui karakteristiknya yakni jumlah, distribusi, komposisi dan kualitasnya. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia berkualitas mutlak dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

1.3. Gambaran Umum Penduduk Kota Tanjungbalai

Jika dilihat dari sudut sex ratio, penduduk Kota Tanjungbalai setiap tahunnya selalu didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Keadaan ini terus berlanjut s/d tahun 2020 dimana jumlah penduduk laki

-laki sebesar 50,51 % dan penduduk perempuan sebesar 49,49 %. Berikut data jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2020.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai Per Tahun 2020
(dalam jiwa)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr
1.	Datuk Bandar	20.194	19.840	40.034
2.	Datuk Bandar Timur	15.757	15.444	31.201
3.	Tanjungbalai Selatan	10.167	10.542	20.709
4.	Tanjungbalai Utara	9.087	8.819	17.906
5.	Sei Tualang Raso	13.839	13.338	27.177
6.	Teluk Nibung	21.056	20.304	41.360
Jumlah		90.100	88.287	178.387

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Penduduk Kota Tanjungbalai berdasarkan struktur usia dari Tahun 2020 umumnya masih didominasi penduduk usia 5 tahun sampai dengan 24 tahun. Keadaan penduduk di kelompok usia ini pada tahun 2020 mencapai 70.090 jiwa atau (339,29%). Penduduk terbanyak adalah di kelompok umur 10 - 14 tahun yaitu sebesar 18.096 jiwa. sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 70-74 sebesar 1.984 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur
Usia Per Juni Tahun 2020 (dalam jiwa)

Golongan Umur	Laki- laki	Perempuan	Lk + Pr
0-4 tahun	7.093	6.730	13.800
5-9 tahun	9.212	8.584	17.936
10-14 tahun	9.264	8.953	18.096
15-19 tahun	8.676	8.961	17.020
20-24 tahun	8.593	8.086	17.038
25-29 tahun	7.946	7.075	15.255
30-34 tahun	7.286	6.554	13.865
35-39 tahun	7.000	6.416	13.527
40-44 tahun	6.095	5.512	11.823
45-49 tahun	5.166	5.199	10.451
50-54 tahun	4.205	4.410	8.592
55-59 tahun	3.454	3.687	7.347
60-64 tahun	2.699	2.742	5.659
65-69 tahun	1.696	1.729	3.679
70-74 tahun	835	1,182	1.984
75 tahun keatas	880	1.434	2.314
Jumlah	90.100	88.287	178.387

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota
2. Sekretaris Daerah
3. 3 (tiga) orang Staf Ahli
4. 3 (tiga) orang Asisten , yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, Asisten Administrasi
5. 9 (sembilan) Bagian, yaitu Bagian Pemerintahan dan otonomi daerah, Bagian Hukum dan Ham, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Umum, Bagian Protokol, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Barang dan Jasa.
6. 20 (dua puluh) Dinas yaitu Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingkungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Dinas P erhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.)
7. Inspektorat
8. Sekretariat DPRD
9. 5 (lima) Badan Daerah kota yaitu Badan PerencanaanPembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan politik; Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. 6 (enam) Kecamatan yaitu, Kecamatan Datuk Bandar; Kecamatan Datuk Bandar Timur; Kecamatan Tanjungbalai Selatan; Kecamatan Tanjungbalai Utara; Kecamatan Sei Tualang Raso; Kecamatan Teluk Nibung

1.5 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2014 s/d 2019 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan. Dari hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di Tanjungbalai tercatat sebanyak 18.890 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 17.800 usaha/perusahaan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan. Lapangan usaha jasa lainnya merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,19 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,70 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai di tahun 2019 mengalami peningkatan dan tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6

**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2019**

No	KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,78	5,57	5,76	5,77	5,79
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,23	5,1	5,18	5,18	5,22
3.	Nasional (persen)	5,01	4,88	5,03	5,17	5,02

Sumber :Badan Pusat Statistik

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalaiselama tahun 2015-2019 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,74 trilyun dari Rp.5,43 trilyun pada tahun2015 menjadi Rp.8,18 trilyun pada tahun 2018 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2015-2019. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan: pertama, pembatalan pengadaan alat pengolahan sampah yang diproyeksikan tahun sebelumnya dapat menjadi sumber pendapatan/ retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; kedua, pada tahun 2019 ada penerimaan kekurangan bayar oleh Provinsi yang selama ini masuk dalam pos lain-lain pendapatan yang sah sebagai dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau pemerintah lainnya sehingga pada tahun 2020 pendapatan menjadi berkurang. Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 1.7.
Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2015-2018 dan Estimasi
Tahun 2019-2021 Kota Tanjungbalai

No	INDIKATOR	SATUAN						Estimasi		PRAKIRAAN TARGET	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,57	5,76	5,77	5,79	5,95	6,05	6,15		
2	PDRB ADHB	Miliar Rp	6.051,92	6.722,59	7.424,96	8.161,72	9.598,60	10.818,02	12.213,54		
3	PDRB ADHK 2010	Miliar Rp	4.637,50	4.904,54	5.174,84	5.473,63	5.811,61	6.163,01	6.542,07		
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	36,236	39,759	44,373	47,175	54,342	60,394	67,237		
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	Juta Rp	27,766	29,006	30,229	31,584	32,902	34,406	36,014		
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,08	14,49	14,46	14,04	11,16	10,48	9,90		
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,06	NA	5,50	5,58	5,5	5,5	5,5		
8	IPM	Persen	66,74	67,09	67,41	68,00	69,30	69,95	70,6		

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai 2016-2021

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan daerah, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran sebesar 5,9-6,1 persen. Dari aspek kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan akan menurun, diperkirakan akan berada pada kisaran 10,48 persen pada tahun 2020. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun.

1.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.7 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2020 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- 2) Kebijakan Dana Perimbangan meliputi:
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah “Aneka Usaha Kualo” yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
 - b. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;

- d. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit Daerah T. Mansyur untuk peningkatan pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan: pertama, pembatalan pengadaan alat pengolahan sampah yang diproyeksikan tahun sebelumnya dapat menjadi sumber pendapatan/ retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; kedua, pada tahun 2019 ada penerimaan kekurangan bayar oleh Provinsi yang selama ini masuk dalam pos lain-lain pendapatan yang sah sebagai dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau pemerintah lainnya sehingga pada tahun 2020 pendapatan menjadi berkurang. Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 1.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota
Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARG ET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	604.913.166.675,52	621.106.490.865,80	709.306.552.935,00	673.591.011.188,00	673.591.011.188,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	65.108.266.615,52	69.683.146.638,80	91.602.141.086,00	87.102.141.086,00	87.102.141.086,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.276.990.377,02	16.012.087.186,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.591.832.466,01	20.174.105.009,44	45.650.846.400,00	39.150.846.400,00	39.150.846.400,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.594.848.027,00	3.300.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.644.595.745,49	30.196.954.443,36	24.951.294.686,00	26.951.294.686,00	26.951.294.686,00
1.2	Dana Perimbangan	511.282.786.918,00	524.827.102.453,00	575.157.355.000,00	563.953.384.500,00	563.953.384.500,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.044.677.316,00	15.316.080.283,00	32.124.012.000,00	20.920.041.500,00	20.920.041.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	415.172.063.000,00	418.666.416.000,00	435.346.351.000,00	435.346.351.000,00	435.346.351.000,00
1.2.2.1	DAU Tambahan			11.474.278.000,00	11.474.278.000,00	11.474.278.000,00

1.2.3	Dana Alokasi Khusus	83.066.046.602,00	90.844.606.170,00	96.212.714.000,00	96.212.714.000,00	96.212.714.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.522.113.142,00	26.596.241.774,00	42.547.056.849,00	22.535.485.602,00	22.535.485.602,00

BAB-I PENDAHULUAN

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.522.113.142,00	18.747.759.286,00	42.547.056.849,00	22.535.485.602,00	22.535.485.602,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7.848.482.488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)

1.8 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanjaprogram/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021.

2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Mengakomodir program pembangunan yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, maka proyeksi belanja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 (unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	304.271.605.273,00	316.070.199.009,00	366.209.368.452,00	399.955.922.363,00	399.955.922.363,00
2.1.1	Belanja Pegawai	275.628.770.310,00	293.345.409.336,00	341.595.884.579,00	355.160.555.079,00	355.160.555.079,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	1.400.000.000,00	8.111.883.411,00	8.111.883.411,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.451.273.290,00	5.350.000.000,00	5.530.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.905.349.000,00	16.783.805.800,00	15.917.500.000,00	15.917.500.000,00	15.917.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	618.983.873,00	590.983.873,00	565.983.873,00	565.983.873,00	565.983.873,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	667.228.800,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	339.805.777.799,00	341.500.515.436,00	495.797.184.483,00	342.835.088.825,00	342.835.088.825,00
2.2.1	Belanja Pegawai	30.264.865.835,00		14.409.591.038,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.546.470.276,00		235.973.394.504,00		
2.2.3	Belanja Modal	124.994.441.688,00		245.414.198.941,00		
	TOTAL BELANJA	644.077.383.072,00	657.570.714.445,00	862.006.552.935,00	742.791.011.188,00	742.791.011.188,00

Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)

1.9 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Tanjungbalai Tahun 2020. Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Juga dalam menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020 Pemerintah Kota Tanjungbalai menyesuaikan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Hal tersebut secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi Kota Tanjungbalai

2.2.1.Visi

Perumusan visi dan misi dalam RPJMD merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan melalui Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021. Aktualisasi visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melewati proses pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan-kebijakan nasional maupun regional yang harus dipedomani.

Visi adalah sebuah interpretasi life yang bermakna bagaimana memprediksi masa depan sebagai hal yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi yang tertuang di dalam RPJMD ini merupakan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kota Tanjungbalai yang

menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah :

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis"

Visi pembangunan Kota Tanjungbalai ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014, RPJMD dan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025. Visi ini diharapkan dapat terukur keberhasilannya, berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota dengan masyarakatnya yang religius, hidup dalam suasana yang aman, memiliki pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan industri dalam rangka peningkatan pendapatan menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Beberapa pengertian yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah :

- 1) **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud
- 2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km² di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.
- 3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional
- 4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.

- 5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada

2.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen terbaik *stakeholder* baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
- 2) Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
- 3) Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
- 4) Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- 5) Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 6) Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
- 7) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan tujuan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Selanjutnya sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sama halnya dengan tujuan beberapa sasaran dapat menjawab cara mencapai satu tujuan tertentu dan juga harus memperhatikan isu-isu strategis daerah.

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai
Tahun 2016-2021

No.	Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021
1.	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
2.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious dan berakhlaq mulia
3.	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
6.	Mewujudkan kualitas penataan kawasan kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik
7.	Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya
8.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Kedelapan tujuan di atas merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun Jangka Pembangunan Menengah.

Sasaran Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021 ialah :

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3.	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat
4.	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah
5.	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah
6.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
7.	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas
8.	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas
9.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
10.	Meningkatnya ketersediaan penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim
11.	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum
12.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

Kedua belas sasaran di atas merupakan wujud dari apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai secara nyata melalui Visi dan Misi dan Tujuan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021, yang akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai tahunan selama masa 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah.

Berikut disajikan tabel yang berisikan sasaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Tanjungbalai

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan public yang prima	1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	• Opini BPK terhadap LKPD • Tingkat Akuntabilitas Kinerja • Persentase SKPD yang menerapkan SPIP • Nilai peringkat evaluasi LPPD
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Nilai SKM terhadap pelayanan pemerintah kota (%)
2. Membina dan memajukan kehidupan umat bergama menuju masyarakat yang religious dan berakhlak mulia	2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious dan berakhlak mulia	3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	• Berkurangnya permasalah sara
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera	3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah	4. Meningkatnya produktivitas sector perekonomian daerah	• PDRB ADHK (Rp.juta) • PDRB ADHB (Rp.juta)
		5. Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	• Tingkat pengangguran terbuka • Nilai investasi (Rp.000)
		6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	• Pertumbuhan ekonomi • PDRB/Kapita ADHK (Rp.000) • IPM

4.Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4.Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK	7. Meningkatkan sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	APK (%)
			• PAUD • SD/MI • SMP/MTs
			APM (%)
			• SD/MI • SMP/MTs
			Angka putus sekolah
			• SD/MI • SMP/MTs
	5.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	8.Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	• Usia harapan hidup • Jumlah kematian ibu • Jumlah kematian bayi • Jumlah kematian balita • Prevalensi penurunan kasus gizi buruk

2

4. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan	5. Mewujudkan kualitas penataan kawasan kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur public	• Kota Tanjungbalai bebas banjir • Persentase penataan kawasan kumuh • Presentase penduduk pengguna air bersih
		10. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang di sertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	• Persentase penanganan sampah di Kota Tanjungbalai • Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan • Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai
6. Membina kehidupan social politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya	7. Mewujudkan harmonisasi kehidupan social politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	11. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	• Peningkatan kesadaran politik masyarakat • Jumlah demo yang berakhir ricuh • Persentase penurunan angka kriminalitas
8. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	8. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian	12. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	• Penurunan Angka kemiskinan

2.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kondisi yang ingin diwujudkan di Kota Tanjungbalai adalah: “Tanjungbalai Maju, Madani dan Memiliki Daya Saing”. Tanjungbalai yang maju itu akan ditandai dengan: menurunnya permasalahan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan tingkat pemerataannya, serta berfungsinya sistem dan kelembagaan politik, hukum dan kelembagaan kemasyarakatan. Tanjungbalai yang madani itu akan ditandai dengan terwujudnya tata kehidupan masyarakat madani (*civil society*), yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban dan sejahtera dalam arti luas. Sedangkan Tanjungbalai yang berdaya saing diartikan sebagai kondisi di mana seluruh para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tanjungbalai mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan yang membawa kepada peningkatan standar hidup, sesuai dengan potensi serta peluang dan tantangan yang nyata ada di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang di atas dan analisis pencapaian RPJMD, serta kajian permasalahan - isu strategis strategis di bagian sebelumnya, maka di bagian ini akan menjelaskan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai 2016-2021.

2.4.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

Strategi pembangunan adalah dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas melalui kebijakan umum guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel berorientasi terhadap kinerja. Strategi

harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Untuk mendapatkan strategi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik lingkungan internal dan eksternal pemerintahan daerah Kota Tanjungbalai maka dilakukan analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities, & threats*). Melalui berbagai alternatif yang muncul, ditetapkan strategi pembangunan dalam rangka menuntuk melaksanakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai;
3. Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan;
2. Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian koperasi, UKM, UMKM serta sektor pariwisata;
2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenagakerjaan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keempat adalah sebagai berikut:

1. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan;
5. Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kelima adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan
2. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keenam adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
3. Pengembangan seni dan budaya lokal.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keterkaitan fokus pembangunan dan arah kebijakan berdasarkan pilihan strategi disajikan pada tabel berikut:

No	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Fokus tata kelola pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai	√	√	√	√	√
		Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	√	√	√	√	√
		Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan	√	√	√	√	√
		Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan.	√	√	√	√	√
		Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru pengajian dalam	√	√	√	√	√

		mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.					
2.	Fokus daya saing perekonomian dan kota simpul jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan bantuan permodalan di sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.	√	√	√	√	√
		Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro.	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenagakerjaan.	√	√	√	√	√
3.	Fokus kemandirian masyarakat	Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan)	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√	√
		Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan.	√	√	√		
		Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.	√	√	√	√	√
		Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat.	√	√	√	√	√
		Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	√	√	√	√	√
		Pengembangan seni dan budaya lokal.	√	√	√	√	√
		Peningkatan keberdayaan masyarakat.		√	√	√	√
		Peningkatan kesejahteraan keluarga.			√	√	√

4.	Fokus sarana dan prasarana perkotaan	Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan.	√	√	√	√	√
		Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.	√	√	√	√	√

2.4.2 Arah kebijakan pembangunan tahun 2020

Penetapan arah kebijakan tahun kelima difokuskan pada beberapa bidang/sector yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih memerlukan upaya dan kerja keras untuk meningkatkan kinerjanya. Arah kebijakan tahun ini masih tetap mengutamakan Sinergitas dan kesinambungan keberlanjutan pembangunan masing masing bidang/sector dengan lebih menekankan pada sector sector yang belum memenuhi target, melalui pelaksanaan program program prioritas yang utamanya adalah program program yang mendukung Pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Berikut ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai yang akan dicapai pada tahun 2020 dengan jumlah

Anggaran APBD pada tahun 2020 sebesar Rp 647.908.935.289,55

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B)
		Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	95%
		Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	3
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	70%

3		Berkurangnya permasalahan Sara	0
	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat		
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	PDRB ADHK (Rp.juta)	6.163.012,09
		PDRB ADHB (Rp.juta)	10.818.022,98
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	Tingkat pengangguran terbuka	7,22%
		Nilai investasi (Rp.000)	20.839.265
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	6,05 %
		PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	34.406,57
		IPM	69,95
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	APK (%)	
		PAUD	10 %
		SD/MI	101,00 %
		SMP/MTs	100.00 %
		APM (%)	
		SD/MI	93,50 %
		SMP/MTs	87,32 %
		Angka putus sekolah	
		SD/MI	0,5%
		SMP/MTs	0,10%
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan	Usia Harapan Hidup	78%
		Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	1%
		Persentase penurunan jumlah kematian bayi (%)	5%

	kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Penurunan jumlah kematian balita (%)	5%
		Prevalensi kasus gizi buruk	0,01%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Kota Tanjungbalai bebas banjir	75 %
		Persentase penataan kawasan kumuh	100 %
		Persentase penduduk pengguna air bersih	85,82%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	96 %
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	0.339
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Kategori sangat kurang (indeks 63,0)

	lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim		
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	75 %
		Jumlah demo yang berakhir ricuh	0
		Persentase penurunan Angka kriminalitas	296 kasus

12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	Penurunan Angka kemiskinan	10,48 %

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2020. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

2. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan realisasinya. Adapun perbandingan Tingkat Capaian *Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dan 2020* yaitu pada tahun 2019 sasaran strategis **Kategori Cukup sebanyak 1 sasaran, Kategori Baik sebanyak 2 sasaran dan kategori sangat baik sebanyak 9 sasaran**, sedangkan tahun 2020 sasaran strategis **kategori cukup sebanyak 3 sasaran, kategori baik 4 sasaran dan kategori sangat baik sebanyak 5 sasaran**. Hal ini ditampilkan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja 2019 dan Capaian Kinerja 2020

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	66,50%	78.16%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	108%	108,98%
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	100%	100%

4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	96,44%	87,64%
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	1.394%	276,25%
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	96,11%	92,62%
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.	107,10%	136,18%
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	93,52%	154,41%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	82,74%	70,22%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	107,94%	87,27%
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya	97,33%	81,64%
	berlandaskan hukum.		
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	79,48%	74,64%
	Jumlah rata-rata	202,43 %	112,33%

Rata rata jumlah capaian kinerja yang diperoleh Pemerintah Kota Tanjungbalai **pada tahun 2019** adalah **202,43%**, tapi di Tahun **2020** terjadi penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu **112,33%**,

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output*, dan indikator kinerja *outcome*. Sedangkan capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome* dan ukuran pada tingkat *outcome* telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan didukung oleh empat indikator kinerja yaitu opini BPK terhadap LKPD, Tingkat akuntabilitas kinerja, Persentase SKPD yang menerapkan SPIP, Nilai peringkat evaluasi LPPD.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Opini BPK terhadap LKPD	Persen	WTP	WDP	80%
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100 %
3	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	Persen	95	50	52,63%
4	Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	Nilai	3	8	80%
Jumlah rata-rata					78.16

Sumber : (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Organisasi & Tatalaksana, Bagian pemerintahan).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Indikator Persentase SKPD yang menerapkan SPIP

Tahun 2020 SPIP telah dilaksanakan oleh perangkat daerah di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah. Kriteria dari perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP level 2, diukur dari persentase perangkat daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya SOP dapat memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam tahapan level 2, perangkat daerah telah mulai menyusun SOP dalam pengendalian kegiatan. Dari 34 (tiga puluh empat) OPD, yang telah membuat SOP sebanyak 17 (Tujuh Belas) OPD atau terealisasi hanya 50%. Pencapaian sasaran ini mengalami hambatan, yaitu kualifikasi SDM yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai. Pembinaan dilakukan dengan melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan SPI OPD di lingkungan Pemerintah Kota

Tanjungbalai. Pada tahun 2020 telah dilakukan Evaluasi kinerja Satuan Tugas SPIP di (17) Tujuh Belas OPD. Untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai serta kepedulian dari seluruh jajaran.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) program yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan;
 - Review rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),
 - Review rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah,
 - Review laporan kinerja

Opini BPK terhadap LKPD

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Tanjungbalai belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Dikarenakan

prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui beberapa rangkaian proses panjang yang pelaksanaannya dilakukan setelah tahun anggaran 2020 berakhir. Dimulai dengan OPD menyusun Laporan Keuangan OPD masing-masing, lalu laporan keuangan yang dibuat OPD di komplikasi menjadi laporan keuangan *unaudited* Pemerintah Kota Tanjungbalai. Setelah itu laporan keuangan *unaudited* selesai di-review oleh Inspektorat, lalu dilakukan koreksi dan tersusunlah laporan keuangan *audited*. Kemudian proses audit oleh BPK dan setelah itu BPK menyerahkan LHP kepada Pemerintah Daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta memberikan penilaian berupa opini.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). **Pencapaian sasaran ini hanya 80%.** Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Memperbaiki Opini BPK terhadap LKPD Walikota Tanjungbalai memerintahkan Inspektorat BPKPAD untuk Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu TA. 2019, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah yang salah satu tugas dan fungsi nya adalah Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah dan Inspektorat yang salah satu tugas dan fungsi nya adalah Pelaksanaan pengujian, penelitian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan setiap unsure dan atau instansi dilingkungan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan BUMD, dengan langkah langkah yang dibuat oleh BPKPAD pada tahun 2019 target dari Opini BPK terhadap LKPD ada kenaikan yaitu WDP, dengan demikian pencapaian sasaran indikator Kinerja ini sebesar **80% Kategori Tidak Mencapai Target.**

Indikator kinerja Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **telah mencapai target/sesuai target** yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 Menargetkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Predikat **B**. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menunjukan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi Hasil sudah menunjukan Hasil yang

baik. Namun masih memerlukan perbaikan. Pemerintah kota Tanjungbalai akan terus berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, supaya lebih mengefektifkan Penerapan Budaya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tanjungbalai dan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator Kinerja Nilai Peringkat Evaluasi LPPD

Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 menerima hasil evaluasi LPPD Peringkat ke 8 Kabupaten/ Kota, berdasarkan hasil tersebut capaian Indikator Kinerja Nilai Peringkat Evaluasi LPPD hanya **80% Tidak Mencapai Target.**

Beberapa Indikator untuk menilai Peringkat Evaluasi LPPD yaitu:

- Penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Penyampaian laporan keuangan sesuai dengan jadwal.
- Capaian indikator kinerja kunci masih rendah.
- Hasil temuan masih harus ditindaklanjuti

Pelaksanaan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD

Sasaran Strategis 2 :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung oleh satu indikator kinerja yaitu :nilai SKM terhadap pelayanan pemerintah.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	Persen	70	76,29	108,98%
Jumlah rata-rata					108,98%

Sumber : (Bagian Organisasi & Tatalaksana).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 melakukan kerjasama dengan CV SPORTIF CITRA MANDIRI untuk melakukan Survei Kepada Masyarakat terhadap pelayanan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Untuk mengetahui seberapa besarnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pelaksanaan survei di laksanakan kepada Tujuh (7) Perangkat Daerah yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 74,07. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 80,74. RSUD Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 73,86. Puskesmas Datuk Bandar hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 77,13. Puskesmas Kampung Baru hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 74,22. Kecamatan Datuk Bandar hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 80,25. Kecamatan Teluk Nibung hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 76,56. Dari hasil Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat Indeks rata rata terhadap Pelayanan di Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah **76,29** dengan Kategori Mutu Layanan **BAIK**. Terhadap hasil Survei tersebut menunjukkan Realisasi dari Indikator Kinerja SKM terhadap Pelayan Pemerintah Kota Tanjungbalai **KategoriSangat Baik** dan **telah melebihi Target** yang ditentukan sebelumnya **108,98%**. Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Strategis 3 :**MENINGKATNYA KEIMANAN DAN KETAQWAAN
APARATUR DAN MASYARAKAT**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat didukung oleh satu indikator kinerja yaitu berkurangnya permasalahan sara.

Tabel 3.4
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan
aparatur dan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Berkurangnya permasalahan sara	Persen	0	0	100
Jumlah rata-rata					100%

Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik)

Pada Tahun 2020 tidak ada kejadian konflik SARA dan Guna menciptakan pemilukada 2020 yang damai dan kondusif, Meskipun ada beberapa kegiatan yang dikurangi anggarannya dalam meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Nilai Luhur Badan Kesbangpol telah melaksanakan untuk 100 peserta dalam penyuluhan FPK yang mengangkat tema pemilukada untuk tingkat pelajar yang dilaksanakan sebelum adanya kebijakan dalam menghadapi pandemic virus covid-19 dan kepengurusan dari forum FPK/FKUB Tersebut di anggarkan operasionalnya dengan harapan dapat menghimpun keberadaan dari seluruh elemen masyarakat dan menghindari adanya permasalahan sara di kota tanjungbalai.

Dengan demikian Indikator Kinerja Berkurangnya permasalahan sara **Kategori Sangat Baik** dan **Mencapai Target** yang telah ditentukan **100%**.

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program dan Kegiatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Operasional FKUB 17 Orang Kegiatan Forum Pembauran KebangsaanOperasional FPK 17 Orang dan Kegiatan Penyuluhan 100

Sasaran Strategis 4 :**MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu PDRB ADHK, PDRB ADHB.

Tabel 3.5**Pencapaian Kinerja Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	PDRB ADHK (Rp.juta)	juta	6.163.012,09	5.790.363,90	92,54%
2	PDRB ADHB (Rp.juta)	juta	10.818..022,98	8.951.450,97	82,74%
Jumlah rata-rata					87,64%

Sumber : (Badan Pusat Statistik)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari Data BPS dalam Buku Kota Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2020 Secara total, PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2019 sebesar 5.790.363,90 atau 92,54 %, dari target yang ditentukan, Indikator Kinerja PDRB (ADHB) **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum MencapaiTarget**.

PDRB (ADHK) di tahun 2019 sebesar 8.951.450,97 atau 82,74% dari target yang ditentukan, sehingga capaian dari Indikator Kinerja PDRB (ADHK) **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum MencapaiTarget** yang telah ditentukan sebesar **82,74%**.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Tanjungbalai periode 2014 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,78 %; 5,57 %; 5,76 %; 5,51%, 5,77 % dan 5,81% Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada periode tahun 2014 - 2019 PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 5.439,08 miliar Rupiah (2014); 6.051,92 miliar Rupiah (2015); 6.722,59 miliar Rupiah (2016); 7.424,96 miliar Rupiah (2017); 8.531,22 miliar Rupiah (2018) dan 9.598,60 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir di Kota Tanjungbalai meningkat, yakni 4.392,58 miliar Rupiah (2014); 4.637,21 miliar Rupiah (2015); 4.904,54 miliar Rupiah (2016); 5.174,85 miliar Rupiah (2017) dan 5.473,63 miliar Rupiah (2018) dan 5.811,61 miliar Rupiah (2019).

Tabel PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK 2010
Tahun 2014 – 2019

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.000)	Atas Dasar Harga Konstan (Rp.000)
2014	5.439,00	4.392,58
2015	6.051,92	4.637,21
2016	6.722,59	4.904,54
2017	7.424,96	5.174,85
2018	8.531,22	5.473,63
2019	9.598,60	5.811,61

Sasaran Strategis 5 :**MENINGKATNYA DAYA SAING PELAKU USAHA DAN KETENAGAKERJAAN YANG MENDUKUNG DAYA SAING DAERAH**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka, nilai investasi.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,22	6,82	94,45
2	Nilai investasi (Rp.000)	Rupiah	20.839.265	75.692.524.820	363.6
Jumlah rata-rata					276,25%

Sumber : (Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan data BPS, Indikator Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Tanjungbalai Tahun 2020 di ambil dari data BPS dalam Buku Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2020 yaitu sebesar 6,97 persen. Jumlah pengangguran sebanyak 5.218 orang, dengan Angkatan kerja Kota Tanjungbalai berjumlah 76.490 orang. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja 71.272 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,83 persen. Sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai bekerja disektor pertanian yang utamanya perikanan yaitu sebanyak 20,11 persen, kemudian sebanyak 18,85 persen bekerja di sektor perdagangan.

Adapun Pencapaian indikator-indikator di atas, belum mencapai target yang telah ditetapkan salah satu faktornya dikarenakan dampak corono virus diseases yang menyebar keseluruh negeri termasuk Kota Tanjungbalai. Mengakibatkan terbatasnya Lapangan Pekerjaan yang tersedia di Kota Tanjungbalai. Adapun upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada pencari kerja agar mereka dapat

mengembangkan keahlian dan ketrampilannya, sehingga mereka dapat membuka usahanya sendiri. Upaya selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai akan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di luar Kota Tanjungbalai untuk dapat melakukan penerimaan/penempatan tenaga kerja yang berasal dari Kota Tanjungbalai.

Nilai Investasi Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2019 realisasinya sangat besar yaitu **Rp 255.893.236.000**, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai investasi sebesar **75.692.524.820**, walaupun terjadi penurunan nilai investasi tapi masih melebihi target yang telah di tentukan. Dengan nilai Investasi diatas maka Indikator Kinerja Nilai investasi (Rp.000) **Kategori Sangat Baik dan Melebihi Target 363,6%.**

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Kegiatan Pengembangan Aplikasi Database dan Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

Faktor- Faktor Penyebab Nilai Investasi Melebihi Target, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Memiliki Aplikasi OSS (Online Single Submission) merupakan Aplikasi Perijinan yang Terintergrasi ke Pusat sehingga proses Penerbitan ijin dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia. Kesadaran Masyarakat/ Pelaku Usaha untuk mengurus Izin Usahan Percepatan Layanan Perizinan.

Sasaran Strategis 6 :

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB/Kapita ADHK, IPM.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	6,05	5,32	87,93%
2	PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	Rupiah	34.406,57	31.584.351	91,79%
3	IPM	Persen	69,95	68,65	98,14%
Jumlah rata-rata					92,62%

Sumber : (Badan Pusat Statistik)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai sebesar 5,51 persen, Pada tahun 2018 laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai sebesar 5,77 persen, pada tahun 2019 **menjadi 5,32 persen**, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun laju pertumbuhan ekonomi naik walaupun tidak tinggi, Indikator Kinerja Pertumbuhan ekonomi **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target 87,93%**.

**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai,
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019**

NO	KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,57	5,76	5,51	5,77	5,81
2.	Provinsi Sumatra Utara(persen)	5,1	5,18	5,12	5,18	5,25

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai mengalami perubahan pola pertumbuhan yang sama dengan Sumatera Utara. Pola perubahan pertumbuhan tersebut adalah pada tahun 2015 mengalami penurunan, tahun 2016 meningkat, tahun 2017 menurun dan tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan kembali. Laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai selalu berada di atas laju pertumbuhan provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 hingga 2019. Laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai tahun 2019

sebesar 5,81 persen sedangkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,25 persen.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2014 - 2018 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2019, PDRB perkapita Kota Tanjungbalai mencapai **31.584.351** rupiah, berdasarkan Target yang telah ditentukan 34.406,57, Indikator Kinerja PDRB/Kapita ADHK (Rp.000) **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target hanya 91,79%.**

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sedang”. Angka ini menunjukkan peningkatan IPM yang tidak terlalu jauh dengan Tahun 2017 yakni sebesar 67,41. Angka ini mengantarkan Kota Tanjungbalai pada posisi dua puluh empat dari 33 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai mencapai **68,51** pada tahun 2019. Dengan capaian IPM itu, berdasarkan Target yang telah ditentukan **69,95** Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target hanya 98,14%.**

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 mencapai usia 62,60 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun keatas di Kota Tanjungbalai telah menempuh pendidikan hingga 9,24 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas I. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan minimal mampu bersekolah hingga 13 tahun atau mencapai Diploma I. Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat

dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita Kota Tanjungbalai sebesar 11,10 juta rupiah per tahun 2019. Perbandingan IPM Kota Tanjungbalai tahun lalu pada tahun 2018 sebesar 68,00, lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar 68,51.

Walaupun di tingkat Provinsi IPM Kota Tanjungbalai menduduki rangking ke 24, namun angka IPM Kota Tanjungbalai ini telah mengalami peningkatan yang cukup lumayan dibandingkan dengan IPM tahun lalu. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara, di Tahun 2019 ini Kota Tanjungbalai berada pada posisi ke dua puluh empat (24) dari 33 Kabupaten/Kota. Posisi tersebut merupakan posisi yang sama dengan tahun sebelumnya. Kota Tanjungbalai meningkat lebih lambat dibandingkan Kota Gunungsitoli yang meningkat sebanyak 0,65 dalam setahun, sedangkan Kota Tanjungbalai meningkat 0,59 dalam setahun. Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia di Kota Medan telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Disusul oleh Kota Pematang Siantar dan Kota Binjai yang masuk pada kategori “tinggi”. Ketiga kota inilah yang menduduki peringkat 1,2 dan 3 IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Nias, Nias Selatan dan Nias Barat berada pada peringkat IPM 3 paling rendah, diikuti dengan Nias Utara dan Kota Gunungsitoli yang berada pada satu Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tanjungbalai pada tahun 2018 telah mencapai 68,00 dan masih berstatus “sedang”. Pada tingkat Kabupaten/Kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 80,65 dan termasuk kategori IPM ‘Sangat Tinggi’. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat yaitu sebesar 60,42.

Sasaran Strategis 7 :

**MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN
PENDIDIKAN SERTA SUMBERDAYA PENDIDIKAN
YANG BERKUALITAS**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Terciptanya Produktifitas Pada Sektor
Ekonomi

Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				
	PAUD	Persen	10%	51,50%	515,00%
	SD/MI	Persen	101%	102,51%	101.50%
	SMP/MTs	Persen	100%	98.15%	98%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)				
	SD/MI	Persen	93,50%	90,64%)	96,94%
	SMP/MTs	Persen	87,32%	78,43%	89,82%
3	Angka putus sekolah				
	SD/MI	Persen	0.5%	0.12%	24%
	SMP/MTs	Persen	0.10%	0.49%	28%
Jumlah rata-rata					136,18%

Sumber : (Dinas Pendidikan)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Rasio Jumlah Siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara Umum di suatu tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Hitungan APK menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\textbf{APK PAUD} &: \frac{\text{Jumlah Siswa PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3-6 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{5.309}{10.307} \times 100\% \\ &= \mathbf{51,50\%}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textbf{APK SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SD/MIX}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{22.257}{21.711} \times 100\% \\ &= \mathbf{102,51\%}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textbf{APK SMP/MTS} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTSX}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{10.943}{11.149} \times 100\% \\ &= \mathbf{98,15\%}\end{aligned}$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk Usia yang sesuai, Makin Tinggi APM artinya makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Hitungan APM menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{APM SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI Usia 7-12 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Thn}} \times 100\% \\
 &= \frac{19.681}{21.711} \times 100\% \\
 &= \mathbf{90,64\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{APM SMP/MTS} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTS Usia 13-15 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Thn}} \times 100\% \\
 &= \frac{8.606}{10.972} \times 100\% \\
 &= \mathbf{78,43\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{APS SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APSSD/MI se Kota}}{\text{Jumlah Seluruhnya APS SD/MI}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,96}{8} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,12 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{APS SMP/MTS} &: \frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APSSMP/MTS se Kota}}{\text{Jumlah Seluruhnya APS SMP/MTS}} \times 100\% \\
 &= \frac{33}{67} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,49 \%}
 \end{aligned}$$

Faktor Penyebab masih tingginya angka Putus Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Faktor Ekonomi.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) , Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah (APS): Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Sasaran Strategis 8 :

**MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN
KESEHATAN SERTA SUMBERDAYA KESEHATAN YANG
BERKUALITAS**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas didukung oleh lima indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup, Persentase penurunan jumlah kematian Ibu, Persentase penurunan jumlah kematian bayi, Penurunan Jumlah kematian balita (%), Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk.

Tabel 3.9
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya sistem dan akses layanan
kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Usia Harapan Hidup	Persen	78%	67.9%	87,0.5%
2	Meenurun nya persentase jumlah kematian Ibu (%)	Persen	1%	1%	100%
3	Menurun nya persentase jumlah kematian bayi (%)	Persen	5%	3%	166%
4	Menurun nya persentase Jumlah kematian balita (%)	Persen	5%	4%	125%
5	Prevalensi kasus gizi buruk	Persen	<2	0,68%	294%
Jumlah rata-rata					154,41

Sumber : (Dinas Kesehatan).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup

Pada tahun 2017 cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia sebesar 33% jika dibandingkan dengan target 70% maka dapat dilihat bahwa cakupan layanan pada usia produktif dan lanjut perlu ditingkatkan dan diinovasikan dengan program kegiatan yang lebih mendukung. Pada tahun 2019, angka cakupan layanan ini semakin meningkat yaitu 60.66%, namun capaian ini juga belum memenuhi target yang berkisar di angka 75%. Pada tahun 2020,

angka cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 67.9% dan capaian ini masih jauh dari target yaitu 75%, jika dihitung realisasi capaian hanya mencapai 90.5% dari tergetUntuk dapat meningkatkan hal ini, beberapa langkah yang dilakukan antara lain :

1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kegiatan ini adalah pelaksanaan senam sehat lansia dan perayaan hari lanjut usia nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas se Kota Tanjungbalai dengan peserta para lansia di wilayah kerja Puskesmas. Diharapkan dengan adanya kegiatan senam sehat lansia ini membantu tubuh para lansia tetap bugar dan sehat.

2. Pendidikan dan perawatan kesehatan

Kegiatan ini merupakan pelatihan kepada petugas pengelola program kesehatan lansia di Puskesmas yang membahas mengenai tatalaksana perawatan kesehatan lansia dan pelatihan ini diberikan juga bagi kader Posyandu lansia.

Indikator Kinerja Menurun nya persentase jumlah kematian Ibu (%)

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu didapat dari jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai tahun 2010 jumlah kematian ibu yaitu 9 orang. Pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 13 orang yang terdiri dari 3 kasus kematian pada ibu hamil berusia ≥ 35 tahun, 3 kasus kematian pada ibu bersalin yang juga berusia ≥ 35 tahun dan 1 kasus terjadi pada ibu nifas (2 kasus yang berusia 20-34 tahun dan 1 kasus yang berusia ≥ 35 tahun). Pada tahun 2012 jumlah ibu yang meninggal menurun menjadi hanya 6 orang, 4 orang meninggal pada saat hamil dan 2 orang meninggal pada saat bersalin. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu meningkat kembali menjadi 10 kasus, dimana 3 kasus kematian terjadi pada ibu hamil, 6 kasus kematian ibu bersalin dan 1 kasus kematian pada ibu nifas. Terjadi penurunan jumlah

kematian ibu pada tahun 2014 menjadi hanya 4 kasus yaitu 2 kasus pada ibu bersalin dan 2 kasus kematian ibu pada masa nifas. Pada tahun 2015 jumlah kematian ibu sama dengan tahun 2014 yaitu 4 kasus dengan persebaran 1 kasus kematian ibu hamil dan 3 kasus kematian pada ibu nifas. Pada tahun 2018 tidak ditemukan kematian ibu hamil di Kota Tanjungbalai, namun kematian ibu bersalin sebanyak 1 orang di Tanjungbalai Utara dengan usia antara 20-34 tahun dan 1 orang di Sei Tualong Raso dengan usia ≥ 35 tahun. Di Datuk Bandar Timur ditemui 2 kasus kematian ibu Nifas dan di Teluk Nibung ada 1 kasus kematian ibu nifas direntang usia 20-34 tahun. Tahun 2019, kematian pada wanita hamil ada 6 kasus dan pada ibu bersalin ada 1 kasus kematian pada wanita bersalin. Artinya ada 7 kasus kematian ibu di tahun 2019. Sementara jumlah ibu hamil dan melahirkan yang tercatat pada tahun 2019 ada 7139 jiwa. Itu berarti ada 98/100.000 KH kematian ibu di tahun ini. Atau dalam 100.000 ibu (hamil dan melahirkan) ada 98 ibu yang meninggal. Bila mengukur persentase penurunan kematian ibu dengan membandingkan capaian tahun lalu yang berada pada angka 0.07% maka persentase penurunannya sekitar 2% (0.09% - 0.07%). Ini berarti capaian dengan target berhasil 100%. Tahun 2020, terdapat 3382 ibu hamil di Kota Tanjungbalai dan terdapat 3 kasus kematian pada ibu, yaitu 2 kasus kematian ibu hamil, dan 1 kasus kematian ibu bersalin. Bila dilihat dari kondisi diatas, maka capaiannya 0.08%. maka persentase penurunan (0.09% - 0.08%) = 1%, dengan demikian Indikator Kinerja Menurun nya persentase jumlah kematian Ibu (%) dianggap **Berhasil Mencapai Target 100%** Indikator Kinerja Menurun nya persentase jumlah kematian Bayi (%) **Angka Kematian Bayi didapat dari jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur satu (1) tahun per 1000 Kelahiran Hidup. Untuk Kota Tanjungbalai hanya dapat dihitung jumlah kematian bayi.**

Pada tahun 2014 jumlah lkematian bayi sebanyak 77 kasus dan pada tahun 2015 menurun cukup signifikan menjadi hanya sebesar 36 kasus. Pada tahun 2018 terdapat kematian neonatal sebanyak 21 orang terdiri dari 2

orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Untuk kematian bayi sebanyak 24 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Pada tahun 2019 dari 2980 bayi yang dilaporkan, kasus kematian bayi ada 22 kasus. Ini berarti ada dalam 1000 kelahiran (bayi), ada sekitar 7 bayi yang mati. Atau sekitar 7%. Bila dibandingkan dengan kasus ditahun sebelumnya, maka persentase penurunan kematian bayi melebihi target yaitu ada pada angka 10%. Dimana pada tahun 2018, dari 1000 kelahiran (bayi) ada 8 bayi yang mati. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah kematian bayi pada tahun 2020 terjadi kenaikan kasus, yaitu terdapat 12 kasus kematian pada bayi, yaitu 6 bayi laki-laki dan 6 bayi perempuan. Dengan angka kelahiran $12/2717 \times 1000$ kelahiran = 4.4. atau 5 bayi. Maka ini berarti dalam 1000 kelahiran bayi ada 4 orang. Penurunan persentase kematian bayi tahun 2019 ke 2020 adalah $4\%-7\% = -3\%$. Dengan demikian Indikator Kinerja Menurunnya persentase jumlah kematian Bayi (%) dianggap **Berhasil Melebihi Target 166% Indikator Kinerja Menurunnya persentase jumlah kematian Balita (%)** Tahun 2018 ada 11 kasus kematian balita. Bila diperhitungkan dengan jumlah balita yang mendapat layanan yaitu sebesar 12.071 jiwa maka persentase penurunan angka kematian balita adalah 0.09% atau dalam 1000 balita ada 0.9 (1) balita yang meninggal. Tahun 2019 angka kematian balita menurun drastis, yaitu ada sekitar 2 kasus. Hal ini berarti persentase penurunan kematian balita dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 7%.

Dimana dari jumlah balita yang mendapat layanan yaitu sebesar 2980 ada 2 balita yang meninggal. Atau dalam 1000 balita, ada 0.6 balita yang meninggal. Tahun 2020 angka kematian balita menaik yaitu terdapat 3 kasus angka kematian balita, yaitu 2 balita laki-laki dan 1 bayi perempuan dimana dari jumlah balita yang mendapat layanan yaitu sebesar 2723 ada 3 (3%) balita yang mati. Angka kematian balita adalah ini menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan balita yang dilaksanakan selama ini perlu ditingkatkan dikarenakan adanya kenaikan persentase kematian pada

balita dengan melihat bertambahnya jumlah kasus angka kematian balita di Kota Tanjungbalai.

Keberhasilan dalam Pencapaian Target pada ke tiga Indikator tersebut di dukung dengan Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Revitalisasi Sistem Kesehatan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mewujudkan Puskesmas terakreditasi. Kegiatan ini untuk mendukung pencapaian tujuan dalam Renstra Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2019 setiap Kecamatan harus memiliki Puskesmas terakreditasi.

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini berisi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan zat aditif, kegiatan penjangkaran kesehatan siswa SD dan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan kepada kelompok pekerja sektor informal.

3. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang ASI Eksklusif bagi Bidan, kegiatan Kelas Ibu dan Balita, kegiatan PKPR, kegiatan Refresh Buku KIA dan kegiatan Pencatatan dan Pelaporan KB.

4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Kegiatan ini adalah transport bagi kader Posyandu balita dan kader Posyandu lansia sebanyak 118 Posyandu untuk 12 bulan. Kegiatan pemberian transport para kader Posyandu ini diharapkan dapat meringankan biaya transportasi para kader ke Posyandu dan sebagai pemberi semangat agar para kader lebih semangat dalam memberi pelayanan di Posyandu sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan bayi dan balita ke Posyandu. Hasil yang diharapkan jumlah kunjungan bayi balita ke Posyandu akan meningkat 30%.

5. Jaminan Persalinan

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi karena terdiri dari biaya persalinan bagi ibu yang tidak tercover BPJS, transport ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan, operasional rumah tunggu kelahiran beserta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Namun pada tahun 2016 kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan di Kota Tanjungbalai tidak terdapat rumah tunggu kelahiran sehingga dananya tidak bisa digunakan (menurut Juknis Pemanfaatan dana Jampersal daerah harus memiliki rumah tunggu kelahiran baru bisa ditarik dananya).

6. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal

Kegiatan ini berisi klaim pembayaran biaya persalinan ibu-ibu peserta BPJS Kesehatan kepada Bidan yang memiliki MoU dengan BPJS Kesehatan.

Tingkat kesakitan suatu negara juga mencerminkan situasi derajat kesehatan masyarakat yang ada didalamnya. Bahkan tingkat angka kesakitan penyakit menular tertentu yang terkait komitmen internasional senantiasa menjadi sorotan dalam membandingkan kondisi kesehatan antar negara.

Indikator Kinerja Prevalensi kasus gizi buruk

Dari 13.815 balita Kota Tanjungbalai yang dicatat pada tahun 2018, terdapat 75 balita yang terdiagnosa gizi buruk atau sekitar 0.54%. Tahun 2019 jumlah sasaran yang diprediksi ada sekitar 18.837 balita. Dari jumlah diatas, ada 10.759 balita yang ditimbang dan terindikasi gizi buruk sebanyak 45 balita. Ini berarti ada 0.41% kasus gizi buruk pada balita sekota Tanjungbalai. Tahun 2020 jumlah sasaran yang diprediksi ada sekitar

18.656 balita, dari jumlah balita tersebut ada 4.983 balita yang ditimbang dan yang terindikasi gizi buruk sebanyak 34 balita.

34 balita yang terindikasi katagori gizi buruk adalah bentuk capaian yang belum memenuhi target/sasaran. Dimana Pemerintah kota Tanjungbalai dalam hal ini Dinas Kesehatan menargetkan prevalensi gibur berada pada angka <2%, artinya persentase penurunan balita gibur $(2/0.68) \times 100\%$ maka capaian prevalensi penurunannya 294% . Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian, diharapkan ada langkah-langkah terpadu yang disusun dalam pengentasan kasus gizi buruk, antara lain:

1. Meningkatkan peran dari petugas kesehatan melalui pemberian informasi yang benar tentang gizi masyarakat
2. Memberikan tambahan makanan dan vitamin serta melakukan follow up terhadap tumbuh kembang balita
3. Melakukan pemetaan dan pendataan, analisa kemungkinan kecendrungan gizi buruk untuk dapat diakomodir pada program kegiatan yang lebih tepat sasaran.

Sasaran Strategis 9 :

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Kota Tanjungbalai bebas banjir, Persentase penataan kawasan kumuh, Persentase penduduk pengguna air bersih.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Kota Tanjungbalai bebas banjir	Persen	80%	75,34%	94,17
2	Persentase penataan kawasan kumuh	Persen	100%	0%	0%
3	Persentase penduduk pengguna air bersih	Persen	85,82%	100%	116,49%
Jumlah rata-rata					70,22%

Sumber : (Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Indikator kinerja Persentase Penataan Kawasan Kumuh

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Indikator kinerja Persentase Penataan Kawasan Kumuh, Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan persentase penurunan luasan pemukiman kumuh di daerah kota Tanjungbalai. Pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini disebabkan adanya refocusing anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19. Sehingga Pencapaian indikator kinerja ini **tidak tercapai target 0%** yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator kinerja Persentase penduduk pengguna air bersih

Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menyediakan air bersih khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu, melalui Indikator Kinerja Persentase penduduk pengguna air bersih. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 menargetkan sebanyak **452 Rumah** Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan **menargetkan 85,82% dari 452 Rumah** untuk memperoleh Air Bersih, yaitu **$85,82\% \times 452 \text{ Rumah} = 388 \text{ Rumah}$** , ternyata yang **terrealisasi sebanyak 452 Rumah** sesuai dengan data. Jadi **Realisasi Indikator Kinerja Persentase penduduk pengguna air bersih adalah** berdasarkan hitungan diatas capaian **Kategori Sangat Baik dengan predikat melebihi Target 116,49 %**.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Penduduk Pengguna Air Bersih adalah :

Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.

Indikator kinerja Kota Tanjungbalai bebas banjir

Upaya Pemerintah kota Tanjungbalai pada tahun 2020 dalam menangani banjir yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman dengan membangun infrastruktur diantaranya Pembangunan Saluran Drainase ditargetkan sepanjang 577.280 Meter namun yang terbangun sepanjang 369.095 Meter, jadi persentase realisasi pembangunan panjang drainase adalah $369.095 : 565.950 = 63,94\%$.

Cakupan panjang turab/bronjong dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 4.450,00 Meter yang terealisasi sepanjang 2.762,50 Meter, persentase realisasi cakupan panjang turab/bronjong dalam kondisi baik adalah $2.762,50 : 4.250,00 = 62,08\%$.

Saluran drainase dalam keadaan baik yang ditargetkan sepanjang 423 mtr oleh dinas Perkim terealisasi 423 mtr = **100%** berdasarkan data hitungan diatas Jadi Realisasi Indikator Kinerja Tanjungbalai bebas banjir adalah $63,94\% + 62,08\% + 100\% = 226,02\% : 3 = 75,34\%$, capaian realisasi

Kategori Cukup dengan Predikat Target Tidak Tercapai 70,80%.

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Tanjungbalai Bebas Banjir adalah:

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan.(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Program Pembangunan Turab /Talub/Bronjong dengan Kegiatan Pembangunan Turab /Talub/Bronjong.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan.(Dinas Perumahan dan Permukiman).

Sasaran Strategis 10 :

MENINGKATNYA PENATAAN KAWASAN KOTA YANG BERSIH, INDAH DAN RAPI YANG DISERTAI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai, Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan, Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	persen	96%	77,59%()	80,83%
2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	persen	80%	74,70%	87,88%
3	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Persen	Kategori kurang (indeks 63,0)	Kategori sangat kurang (indeks 55,82)	93,1%
Jumlah rata-rata					87,27%

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai.

Layanan sampah terpusat yang cukup besar berada di wilayah kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara. Sedangkan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung belum sepenuhnya terlayani oleh layanan sampah.

Sedangkan estimasi volume timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai dengan jumlah penduduk 177.005 pada tahun 2020, yaitu **± 77.590 kg atau 77,59 ton**

Tabel Volume Sampah Yang Terangkut ke TPA

No	Wilayah Kecamatan	Vol. timbunan sampah ton per hari	Jumlah ritasi armada					
			rit	Vol. terang kut	Pick up	Vol. terang kut	Three cycle	Vol. teran gkut
1.	Tanjungbalai Selatan	9,74	3	8,8	2	2,17	2	0,61
2.	Tanjungbalai Utara	9,1	2	6,1	2	2,05	2	0,70
3.	Datuk Bandar	14,93	2	6,2	1	0,92	1	0,60
4.	Datuk Bandar Timur	14,94	2	5,9	1	0,83	1	0,62
5.	Teluk Nibung	16,94	3	8,7	1	0,88	1	0,40
6.	Sei Tualang Raso	12,16	2	5,7	1	0,80	1	0,53
Total		77,81		48,7		8,23		3,44
			Volume sampah terangkut 60,37 ton/hari (71,59 %)					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2020

Penghitungan volume sampah yang terangkut berdasarkan jumlah ritasi armada pengangkut sampah ke wilayah tersebut yang selanjutnya dilakukan penghitungan di jembatan timbang sebelum masuk TPA. Volume sampah yang terangkut oleh armada besar seperti dump truck dan arm roll yaitu ± 3 ton / rit sedangkan kapasitas pick up ± 800 – 1000 kg per rit dan kapasitas three cycle ± 300 – 400 per rit. Total volume sampah terangkut ± 48,7 + 8,23 + 3,44 = 60,37 ton / hari Persentase Penanganan Sampah Di Kota Tanjungbalai $\frac{60,37}{77,81} \times 100 \% = 77,59 \%$

Hasil penanganan sampah 77,59 % , target penanganan sampah tahun 2020 sebesar 96 % maka capaian nilai capaian kinerja **80,83 %** , termasuk kriteria “ **tinggi** ” nilai ini naik dari capaian kinerja tahun 2019 meskipun target untuk tahun 2020 naik sebesar 96% namun capaian kinerja meningkat , factor penyebab kenaikan tersebut :

1. Disiplin dan komitmen petugas dalam menjalankan tugas
2. Peningkatan kesejahteraan karyawan.

Akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam penanganan sampah , yaitu :

1. Sarana dan prasarana untuk mendukung penanganan sampah belum memadai. Terbatasnya armada pengangkutan sampah terutama dump truck menyebabkan kapasitas pengangkutan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir tidak maksimal;
2. Partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah; dan
3. Belum ada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai yang mengatur pengelolaan persampahan.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai yaitu:

- Penyediaan prasarana & sarana pengelolaan persampahan
- Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
- Peningkatan operasi pemeliharaan prasarana & sarana persampahan

Indikator KinerjaCapaian IKLH Kota Tanjungbalai

Capaian IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2020 yaitu Kategori sangat kurang indeks 58,23 dengan target IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2020 adalah Kategori kurang indeks 63,0 Penghitungan IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2020 tersebut dilakukan dengan penggabungan 30% Indeks Kualitas Air (IKA), 30% Indeks Kualitas Udara dan 40% Indeks Tutupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Daerah Kota Tanjungbalai. Kriteria yang digunakan untuk menghitung indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 adalah berdasarkan analisis dan interpolasi data pemantauan air sungai dengan metode indeks pencemaran.

Indeks Kualitas Air (IKA) daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 diperoleh dengan melakukan pemantauan dan pengambilan sampel air dari 6 (enam) sungai sebagai berikut :

- 1.Sungai Merbau (2 titik)
2. Sungai Bandar Jopang (2 titik)
3. Sungai Bandar Jepang (1 titik)
4. Sungai Asahan (3 titik)
5. Sungai Kapias (1 titik)
6. Sungai Bandar Jaksa (2 titik)

Berdasarkan analisis dan interpretasi data hasil pemantauan kualitas air sungai dapat dihitung status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Indeks – PI) yang terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
BAB-III AKUNTABILITAS KINERJA

dengan parameter uji yaitu DO, BOD, COD, TSS, T-PO₄, Total Coliform dan Fecal Coliform dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tabel. III.6 Status Mutu Air

No.	Titik Sampling	Peruntukan	Status Mutu Air
1.	Sungai Merbau (2 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
2.	Sungai Bandar Jopang (2 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
3.	Sungai Bandar Jopang (1 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
4.	Sungai Asahan (3 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
5.	Sungai Kapias (1 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
6.	Sungai Bandar Jaksa (2 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)

Perhitungan status mutu air di Kota Tanjungbalai tersebut dikonversi menjadi IKA sehingga didapat Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tanjungbalai adalah 55,87.

Indeks kualitas udara (IKU) daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 diperoleh dengan melakukan pemantauan dan pengambilan sampel emisi udara ambien dari 4 (empat) lokasi sampling sebagai berikut :

1. Kawasan Transportasi (1 titik)
2. Kawasan Industri (1 titik)
3. Kawasan Pemukiman (1 titik)
4. Kawasan Perniagaan/Perdagangan (1 titik)

Berdasarkan metode perhitungan dan analisa data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model EU-LEU menggunakan parameter uji SO₂ dan NO₂ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara maka diperoleh klasifikasi kualitas udara untuk masing-masing kawasan sampling tersebut sebagai berikut :

Tabel. III.7 Kualitas Udara Kawasan Sampling

No	Titik Sampling	Klasifikasi
1.	Kawasan Transportasi (1 titik)	Kualitas udara cukup
2.	Kawasan Industri (1 titik)	Kualitas udara cukup
3.	Kawasan Pemukiman (1 titik)	Kualitas udara cukup
4.	Kawasan Perniagaan/Perdagang(1 titik)	Kualitas udara cukup

Perhitungan Pengukuran kualitas udara ambien Kota Tanjungbalai tersebut dikonversi menjadi IKU sehingga didapat Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai adalah 90,78.

Indeks tutupan ruang terbuka hijau (RTH) daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 diperoleh dengan melakukan perhitungan persentase antara luas tutupan lahan terhadap ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 – 2033. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 – 2033 luas RTH yang ditetapkan adalah 960,17 Ha dimana kondisi exsisting tutupan lahan nya adalah **±12%**

Realisasi IKU indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan indeks **58,23** dengan kategori sangat kurang sedangkan target yang harus dicapai yaitu kualitas lingkungan hidup dengan indeks 63,0 kategori kurang, maka diperoleh capaian kinerja **92,4 %** , termasuk kriteria “ **sangat tinggi**” Meskipun hasil capaian kinerja tersebut termasuk kriteria sangat tinggi namun masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Data pemantauan udara belum dapat menunjukkan representasi mewakili seluruh wilayah Kota Tanjungbalai
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap pencemaran air dan udara;
3. Tingginya kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan; dan
4. Kurangnya pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Solusi terhadap masalah tersebut yaitu :

1. Menambahkan lokasi pemantauan yang lebih merata dan mewakili semua kriteria lingkungan;
2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan koordinasi;

3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha melalui program CSR untuk melaksanakan konservasi sehingga cakupan konservasi yang dilaksanakan dapat lebih luas;
4. dan Pengelolaan dan pengembangan hutan kota dengan pemilihan jenis pohon sesuai peruntukannya.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai yaitu :

- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
- Pengembangan data dan informasi lingkungan.

Indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan yakni : Ketersediaan luas RTH di tahun 2020 adalah seluas **1.280 (Ha)**, Ruang Terbuka Hijau dalam Keadaan Baik seluas 956,16 (ha) atau 74,70% Ruang Terbuka Hijau dalam Keadaan Tidak baik Baik seluas 49,60 (ha)

Program yang mendukung Indikator Luasan Ruang Terbuka Hijau dalam Kondisi Baik yaitu :

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) yang didukung dengan Kegiatan Penataan RTH dan Kegiatan Pemeliharaan RTH.

Sasaran Strategis 11 :

TERCIPTANYA KERUKUNAN DAN HARMONISASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA

MENDORONG DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL HUKUM MASYARAKAT YANG BERBUDAYA BERLANDASKAN

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Peningkatan kesadaran politik masyarakat, Jumlah demo yang berakhir ricuh, Persentase penurunan angka kriminalitas.

Tabel 3.12

Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Persen	75%	63,71%	84,94%
2	Jumlah demo yang berakhir ricuh	Kali	0	0	100%
N 3	Persentase penurunan angka kriminalitas	persen	329 kasus / 0,329 %	493 kasus / 0,493 %	60%
Jumlah rata-rata					81,64%

Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik, KPU)

Untuk Meningkatkan kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik diperlukan Sosialisasi Pendidikan politik karena Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini masyarakat dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dan diharapkan angka kesadaran berpolitik dan partisipasi dalam memilih dapat bertambah. Dalam kegiatannya badan kesbangpol juga terdapat kegiatan untuk mendata partai politik agar tertib administrasi dan pendataan terhadap Ormas / LSM yang ada dan melaksanakan kegiatannya di kota tanjungbalai.

Program yang mendukung Indikator Kinerja indikator kinerja Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat :

Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan Kegiatan Koordinasi Forum-forum diskusi politik dan Penyuluhan Kepada Masyarakat.

Belum optimalnya penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini salah satunya adalah situasi ekonomi nasional cenderung menurun dan berbagai kebijakan dalam masa pandemic covid-19 dimana Kota Tanjungbalai yang juga merupakan Wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga harus bekerja keras dalam menghadapi kepulangan dari pekerja migran dalam rangka pencegahan covid-19 di luar negeri dan kejadian ini turut pula menambah banyaknya tingkat pengangguran dikarenakan kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai masih tidak memadai untuk memperkejakan mereka, kebijakan lockdown dan pembatasan lainnya mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kurang berjalannya investasi di daerah. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kasus-kasus kriminal dan narkoba.

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.30 WIB bertempat di Depan Loby Utama Polres Tanjung Balai Jl Jend Sudirman Kel Perwira Kec Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilaksanakan Konferensi Pers Akhir Tahun 2020. Pelaksanaan Kegiatan di Pimpin oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH.

Dimana dipaparkan Perbandingan JTP(jumlah tindak pidana) dan JPTP (jumlah penanganan tindak pidana) periode 2020 Polres Tanjung Balai untuk satuan Sat Reskrim- Tahun 2020 JTP 575 Kasus , Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik sosial. menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial.

Diharapkan dengan adanya peningkatan kewaspadaan dini dan juga adanya sosialisasi wawasan kebangsaan ke depannya dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga menghindari adanya Konflik / kerawanan sosial yang meresahkan masyarakat dan pencegahan unjuk rasa berakhir ricuh di masyarakat,

Dalam pemantauan unjuk rasa di tanjungbalai berlangsung tertib seperti :

Aksi Unras Koalisi Pemuda Peduli Rakyat (KP2R) Tanjungbalai Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 pukul 11.10 WIB bertempat didepan Bank BRI Kota Tanjungbalai Jl Jend Sudirman Kel Sijambi Kec Datuk Bandar Kota Tanjungbalai telah berlangsung Aksi Unras Koalisi Pemuda Peduli Rakyat (KP2R) Kota Tanjungbalai tentang Dugaan Data Manipulatif Penerima Bantuan UKM/BPUM (Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro) oleh Pihak BRI Cabang Tanjungbalai Proses selama Aksi Unras berlangsung sbb :

1. Pukul 11.10 WIB Massa aksi melakukan aksi didepan Bank BRI Cabang Kota Tanjungbalai dengan Aksi Orasi dan memberikan Steatment /selebaran kepada pengguna jalan yang melintas ditempat tersebut.
2. Pukul 11.35 WIB Aksi Massa tidak ditanggapi pihak Bank BRI Cabang Tanjungbalai maka massa membubarkan diri dengan kondisi aman dan tertib.
3. Pukul 11.40 WIB Aksi Unras telah selesai dengan kondisi aman dan tertib.

Dalam Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Dini telah dilaksanakan pemantauan terhadap berbagai kegiatan masyarakat, kegiatan organisasi,

kegiatan partai politik dan termasuk pemilukada, dan juga kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19 telah banyak melakukan koodinasi pemantauan kepulangan tenaga kerja Indonesia yang masuk melalui jalur laut untuk di kumpulkan di kota tanjungbalai di tempat karantina sementara untuk di cek suhu tubuh dan kondisi apakah reaktif terhadap virus covid-19 terdapat beberapa yang menjadi perhatian seperti

1. Rabu tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.50 WIB, bertempat di Lapangan Mako Brimob Subden 3B telah tiba Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi beserta rombongan dalam rangka pengecekan dan peninjauan posko dan Balai karantina sementara pencegahan virus COVID-19 (Corona) di wilayah Kota Tanjungbalai dan Kab. Asahan serta pemberian bantuan alat rapid test dan apd,
2. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 pukul 17.10 WIB telah Tiba WNI/TKI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari Negara Malaysia yg merupakan Warga asal Kota Tanjungbalai sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) org Via Terminal Ferry ASA NIAGA Port Klang Selangor Malaysia - Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai Asahan Kota Tanjungbalai dengan menggunakan Feri MV. Pacific Jet Star 1 sesuai Surat Keterangan KBRI Kuala Lumpur Nomor : 1646/WN/05/2020/04 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia menerangkan bahwa daftar terlampir sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam Gelombang I kepulangan WNI ke Indonesia melalui Pelabuhan Port Klang tujuan Tanjung Balai Asahan pada periode bulan Mei 2020 dimana dilanjutkan sampai gelombang ke III untuk pemulangan yang resmi dan beberapa kedatangan pekerja Indonesia secara tidak resmi baik warga tanjungbalai maupun kota lain di Indonesia dengan jumlah mencapai ribuan orang.

keberadaan 3 orang Rohingya di kota Tanjungbalai, Adapun data dari UNHCR yang keluar pada tanggal 27 September 2020 dan berlaku sampai pada tanggal 27 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1. Name of Applicant : binti Samshul Alam, Asma.

UNCHR File No : 186-20-00311

Date of Birth : 07- Oct-1995

Place of Birth : Gozzon Diya, Maungdaw Township Maungdaw

Nationality : Myanmar

Date of endtry in Indonesia : 07-Sep-2020

2. Name of Applicant : binti Abdul Haque, Hamida Begum.

UNHCR file No : 186-20-00318

Date of Birth : 01-Jan-2001

Place of Birth : Hais Surahat, Hazi Fara, Maungdaw Township, Maungdaw

Nationality : Myanmar

Date of entry in Indonesia : 07-Sep-2020

3. Name of Applicant : Binti Abdul Hal, Asma Bibi

UNHCR File No : 186-20-00316

Date of Birth : 01-Jan-2020

Place of birth : Mayrullah, Maungdaw Township, Maungdaw

Nationality : Myanmar

Date of entry in Indonesia : 07-Sep-2020

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan No : SR.05.02/XI.6.6/027/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan. Hasil dari pemeriksaan kesehatan terhadap 3 orang Rohingya tersebut adalah **Reaktif**. Selanjutnya Kesbangpol kota Tanjungbalai melalui Kabid PKWN bapak Eago Julhelmie, S.Sos melaksanakan koordinasi kepada kepala dinas kesehatan kota Tanjungbalai, bapak Burhanuddin Harahap SKM.M.Kes terkait langkah penanganan terhadap 3 orang Rohingya tersebut.

Kepada Kabid PKWN kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa dinas kesehatan telah melaksanakan rapat pada tanggal 16 Desember tahun 2020 untuk membahas penanganan terhadap 3 orang Rohingya tersebut, dan setelah dilaksanakan mendapat kesimpulan bahwa ketiga orang Rohingya tersebut akan dikirim ke kota Medan dan Dinas Kesehatan akan memfasilitasi transportasi berupa mobil Ambulance.

Sasaran Strategis 12 :**MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL
MASYARAKAT**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Penurunan Angka kemiskinan.

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Penurunan Angka kemiskinan	Persen	10,48	14,04	74,64%
Jumlah rata-rata					74,64%

Sumber : (BPS Kota Tanjungbalai)

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik hasil proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, penduduk Kota Tanjungbalai tahun 2019 berjumlah 175.223 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.895 jiwa per km². **Pada tahun 2018** garis kemiskinan pada level **Rp 397.647**, Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,64% dengan **jumlah penduduk miskin sebanyak 25,30 ribu orang** pada Tahun 2019 Garis Kemiskinan di Kota Tanjungbalai yaitu pada level **Rp 421.671** dengan **Jumlah Penduduk miskin sebanyak 24,54 ribu orang** dan Persentase penduduk miskin 14,04%, **artinya persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan sebesar 790 orang**. persentase capain Indikator Kinerja Penurunan Angka kemiskinan **Kategori Baik** namun **Target Belum Tercapai 74,64%**.

Berdasarkan uraian diatas sepertinya upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di kota Tanjungbalai. Berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menysasar masyarakat berpenghasilan rendah, yakni masyarakat miskin dan rentan miskin diantaranya melalui program beras sejahtera (Rastra), Raskin Madani, Program Keluarga Harapan, Pemberian modal bagi kelompok usaha bersama.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mencapai Target Indikator Kinerja harus didukung oleh anggaran, yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Laporan Keuangan menggunakan sistem pelaporan yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yakni:

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan Informasi keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

REALISASI APBD TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Uraian		JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1		2	3	4	5
PENDAPATAN		643.059.400.544,66	609.734.083.262,45	(33.325.317.282,21)	87,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH		89.849.407.148,16	83.741.678.750,45	(6.107.728.397,71)	54,84
	Pendapatan Pajak Daerah	14.988.355.298,16	14.459.289.151,00	(529.066.147,16)	99,0
	Hasil Retribusi Daerah	38.033.023.000,00	16.891.844.747,35	(21.141.178.252,65)	45,28
	hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3.500.000.000,00	4.926.487.697,00	1.426.487.697,00	102,9 5
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.328.028.850,00	47.464.057.155,10	14.136.028.305,10	53,13
	Dana Perimbangan	512.953.892.279,00	502.574.166.774,00	(10.379.725.505,00)	95,18
	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	18.769.043.279,00	13.770.117.870,00	(4.998.925.409,00)	57,95
	Dana alokasi umum	412.466.823.000,00	410.581.497.000,00	(1.885.326.000,00)	100
	Dana alokasi khusus	68.302.855.000,00	64.807.380.904,00	(3.495.474.096,00)	85,23
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	40.256.101.117,50	23.418.237.738,00	(16.837.863.379,50)	63,45
	Pendapatan hibah	21.433.640.788,50	0,00	(21.433.640.788,50)	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.822.460.329,00	23.418.237.738,00	4.595.777.409,00	95,45
BELANJA		642.104.045.246,50	596.906.909.800,39	(45.197.135.446,11)	74,66
BELANJA TIDAK LANGSUNG		380.517.017.319,00	358.115.462.731,00	(22.401.554.588,00)	91,49
Belanja Pegawai		312.660.375.621,00	292.300.414.771,00	(20.359.960.850,00)	97,51
Belanja hibah		37.029.100.000,00	36.324.100.372,00	(704.999.628,00)	97,75
Belanja bantuan sosial		15.472.967.000,00	14.929.537.500,00	(543.429.500,00)	95,45
Belanja bantuan keuangan kepd provinsi/Kab/Kota & Pemerintahan Desa		654.574.698,00	654.574.698,00	0,00	96,58
	Belanja tidak terduga	14.700.000.000,00	13.906.835.390,00	(793.164.610,00)	82,30

BELANJA LANGSUNG		261.587.027.927,50	238.791.447.069,39	(22.795.580.858,11)	62,71
	Belanja pegawai	261.587.027.927,50	18.700.517.258,00	(1.344.435.199,00)	86,25
	Belanja barang dan jasa	184.280.706.874,47	166.183.238.991,32	(18.097.467.883,15)	83,07
	Belanja modal	57.261.368.596,03	53.907.690.820,07	(3.353.677.775,96)	39,97
	SURPLUS/DEFISIT	955.355.298,16	12.827.173.462,06	11.871.818.163,90	0,61
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		2.344.644.701,84	5.455.399.718,33	3.110.755.016,49	6,71
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun	0,00	14.982.573.180,39	14.982.573.180,39	143,7 7
	anggaran sebelumnya				
	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	100,0 0
	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	100,0 0
	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(955.355.298,16)	2.155.399.718,33	3.110.755.016,49	3,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	(988.010.905,50)	(988.010.905,50)	0,00

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 Rp 609.734.083.262,45 atau 90,52 % berkurang Rp.33.325.317.282,21 atau 9,48% dari target pendapatan sebesar Rp. 643.059.400.544,00

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 596.906.909.800,39 atau 92,96% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.642.104.045.246,50 dan realisasi Belanja modal sebesar Rp.53.907.690.820,07 atau 94,14 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 57.261.368.596,03

3. Anggaran Belanja Pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 596.906.909.800,39 terhadap 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja.

Dari 35 (tiga Puluh Lima) Indikator Kinerja yang Melebihi Target Kinerja sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja, yang Mencap Target sebanyak 4 (Empat) Indikator Kinerja, Tidak Mencapai Target sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator Kinerja.

Berikut tabel capaian kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2020:

**TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	Tidak Mencapai Target
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B)	Baik (B)	Mencapai Target
3	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	95%	52,63%	Tidak Mencapai Target
4	Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	3	8	Tidak Mencapai Target
5	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	70%	76,99%	Melebihi Target
6	Berkurangnya Permasalahan Sara	0	0	Mencapai Target
7	PDRB ADHK (Rp.juta)	6.163.012.09	5.790.363,90	Tidak Mencapai Target
8	PDRB ADHB (Rp.juta)	10.818..022,98	8.951.450,97	Tidak Mencapai Target
9	Tingkat pengangguran terbuka	7,22%	6,82%	Melebihi Target
10	Nilai investasi (Rp.000)	20.839.265	75.692.524.820	Melebihi Target
11	Pertumbuhan ekonomi	6,05 %	5,32%	Tidak Mencapai Target
12	PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	34.406,57	31.584.351	Tidak Mencapai Target

13	IPM	69,95%	68,51%	Tidak Mencapai Target
	APK (%)			
14	PAUD	10%	51,50%	Melebihi Target
15	SD/MI	101 %	102,51%	Melebihi Target
16	SMP/MTs	100%	98,15%	Tidak Mencapai Target
	APM (%)			
17	SD/MI	93,50 %	90,64%	Tidak Mencapai Target
18	SMP/MTS	87,32 %	78,43%	Tidak Mencapai Target
	Angka Putus Sekolah			
19	SD/MI	0,5%	0,12%	Tidak Mencapai Target
20	SMP/MTS	0,10%	0,49%	Tidak Mencapai Target
21	Usia Harapan Hidup	78%	67,9%	Tidak Mencapai Target
22	Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	1%	1%	Mencapai Target
23	Persentase penurunan jumlah kematian Bayi (%)	5%	3%	Melebihi Target
24	Persentase penurunan jumlah kematian Balita (%)	5%	4%	Melebihi Target
25	Prevalensi kasus gizi buruk	<2	0,68%	Melebihi Target
26	Kota Tanjungbalai bebas banjir	80%	75,34%	Tidak Mencapai Target
27	Persentase penataan kawasan	100%	0%	Tidak Mencapai

	kumuh			Target
28	Persentase penduduk pengguna air bersih	85,82%	100%	Melebihi Target
29	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	96%	77,59%()	Tidak Mencapai Target
30	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	80%	74,70%	Tidak Mencapai Target
31	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Kategori kurang (indeks 63,0)	Kategori sangat kurang (indeks 55,82)	Tidak Mencapai Target
32	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	75%	63,71%	Tidak Mencapai Target
33	Jumlah demo yang berakhir ricuh	0	0	Mencapai Target
34	Persentase penurunan Angka kriminalitas	329 kasus / 0,329 %	493 kasus / 0,493 %	Tidak Mencapai Target
35	Penurunan Angka kemiskinan	10,48	14,04	Tidak Mencapai Target

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 ini , dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Tanjungbalai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 35 (tiga puluh lima) indikator dari 12 (dua belas) Sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dengan sasaran dengan nilai >100 sebanyak 4 sasaran (348,58%), sasaran dengan nilai >95-100 sebanyak 4 sasaran (97,47%), sasaran dengan nilai >85-95 sebanyak 1 sasaran (93,52%), sasaran dengan nilai >75-85 sebanyak 3 sasaran (81,11). Secara keseluruhan capaian kinerja Kota Tanjungbalai dapat disimpulkan telah mencapai nilai rata-rata sebesar **112,33% atau SANGAT BAIK** , dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan 4 (empat) indikator sebesar 78,16 % atau KATEGORI BAIK.
2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 1 (satu) indikator sebesar 108,98% atau KATEGORI SANGAT BAIK.

3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparaturnya dan masyarakat dengan 1 (satu) indikator sebesar 100 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
4. Pencapaian sasaran 4 Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 87,64 % atau KATEGORI BAIK.
5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 276,25 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3(tiga) indikator sebesar 92,62 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
7. Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas dengan 7 (tujuh) indikator sebesar 136,18% atau KATEGORI SANGAT BAIK.
8. Pencapaian sasaran 8 Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas dengan 5 (lima) indikator sebesar 154,41% atau KATEGORI SANGAT BAIK.
9. Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik dengan 3 (tiga) indikator sebesar 70,22% % atau KATEGORI CUKUP.
10. Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dengan 3 (tiga) indikator sebesar 87,27% atau KATEGORI BAIK.
11. Pencapaian sasaran 11 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum dengan 3 (tiga) indikator sebesar 81,64 % atau KATEGORI BAIK.
12. Pencapaian sasaran 12 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat dengan 1 (satu) indikator sebesar 74,64 % atau KATEGORI CUKUP.

Anggaran belanja daerah APBD Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 642.104.045.246,50 (Enam ratus Empat puluh dua milyar seratus Empat juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam koma lima puluh rupiah)dengan realisasiRp. 596.906.909.800,39 atau 92,96% (Lima ratus Sembilan puluh Enam milyar Sembilan ratus Enam juta Sembilan Ratus Sembilan ribu Delapan ratus , Tiga puluh Sembilan sen rupiah).

Pencapaian target indikator yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, khususnya untuk tahun anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dikategorikan **BAIK**. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan sejahtera.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksud Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah:

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis".

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 2) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku..
- 3) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.
- 5) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan seta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga.

Tanjungbalai, Maret 2021

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL, SH, MH